

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama: Menelusuri Konflik Indonesia-Malaysia

Politik

- Dana Mengalir di DPR ■
- Menakar Kinerja DPR ■

Sosial

- Toleransi Beribadah di Ujung Tanduk ■
- Wacana Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia ■

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Menelusuri Konflik Indonesia-Malaysia	2
POLITIK	
Dana Mengalir di DPR	7
Menakar Kinerja DPR.....	10
SOSIAL	
Toleransi Beribadah di Ujung Tanduk	13
Wacana Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia.....	16
PROFILE INSTITUSI.....	19
PROGRAM RISET DAN PELATIHAN	20
ADVERTORIAL INDONESIA 2009.....	22

Tim Penulis :

Anies Baswedan (**Direktur Eksekutif & Riset**), Endang Srihadi (**Koordinator**),
Aly Yusuf, Antonius Wiwan Koban, Hanta Yuda AR.

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada masa pemerintahan presiden Soekarno (1963-1966) ternyata masih menyisakan bara konflik yang masih timbul di kemudian hari. Kalau konfrontasi ketika itu dipicu oleh adanya pembentukan negara boneka buatan Inggris di Kalimantan Utara yang merupakan wujud imperialisme dan kolonialisme baru Inggris atas nama Malaysia, maka konflik Indonesia–Malaysia setelah itu dipicu oleh berbagai sebab antara lain: pelanggaran perbatasan kedua negara, masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dan masalah klaim budaya Indonesia yang dilakukan oleh Malaysia.

Kasus-kasus pelanggaran batas wilayah antara kedua negara memang muncul menjadi isu utama dalam konflik Indonesia dengan Malaysia. Kasus terakhir mengenai penangkapan tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Polisi Diraja Malaysia yang kemudian kembali memicu konflik antara dua negara ini semakin memanas dan tidak hanya melibatkan elite pemerintahan saja tapi juga telah menyebar kepada tingkatan masyarakat (*state people*). Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang menelusuri konflik Indonesia-Malaysia.

Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di bidang politik dan sosial. Bidang politik mengangkat tema tentang dana yang mengalir di DPR. Tema lainnya tentang menakar kinerja DPR. Di bidang sosial mengangkat tema mengenai toleransi beribadah yang diujung tanduk dan tema tentang wacana pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi dan *think tank* internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Indonesia.

Selamat membaca.

Menelusuri Konflik Indonesia-Malaysia

Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada masa pemerintahan presiden Soekarno (1963-1966) ternyata masih menyisakan bara konflik yang masih timbul di kemudian hari. Kalau konfrontasi ketika itu dipicu oleh adanya pembentukan negara boneka buatan Inggris di Kalimantan Utara yang merupakan wujud imperialisme dan kolonialisme baru Inggris atas nama Malaysia, maka konflik Indonesia-Malaysia setelah itu dipicu oleh berbagai sebab antara lain: pelanggaran perbatasan kedua negara, masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dan masalah klaim budaya Indonesia yang dilakukan oleh Malaysia.

Perbatasan wilayah

Konfrontasi Indonesia-Malaysia memang telah berakhir pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto dengan adanya perjanjian damai antar kedua negara pada 11 Agustus 1966. Sejak saat itu hubungan Indonesia-Malaysia relatif berjalan normal.

Namun, hubungan Indonesia-Malaysia seringkali kembali memanas ketika muncul persoalan mengenai sengketa perbatasan antar kedua negara. Kasus yang paling mendapat perhatian adalah mengenai perebutan Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan Malaysia pada tahun 2002 melalui mekanisme Mahkamah Internasional. Isu sengketa perbatasan terus berlanjut dengan klaim Malaysia terhadap blok Ambalat pada tahun 2005 dan 2009.

Kasus-kasus pelanggaran batas wilayah antara kedua negara memang muncul menjadi isu utama dalam konflik Indonesia dengan Malaysia. Kasus terakhir mengenai penangkapan tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Polisi Diraja Malaysia yang kemudian kembali memicu konflik antara dua negara ini semakin memanas dan tidak hanya melibatkan elite pemerintahan saja tapi juga telah menyebar kepada tingkatan masyarakat (*state people*).

Merujuk kepada analisa Jaleswari Pramodawardani (Bara dalam Hubungan Indonesia-Malaysia, Metrotv news, 15 September 2010),

meledaknya kasus batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, selain dipicu ketidaktegasan pemerintah Indonesia mengenai batas wilayah juga mencerminkan beberapa hal. *Pertama*, minimnya pemahaman dan *political will* pemerintah serta para pemangku kepentingan tentang kesadaran ruang dan kesadaran garis batas wilayah negara.

Kedua, adanya kebijakan yang saling tumpang tindih, dan tidak menjadikan laut dan perairan kita sebagai pemersatu bangsa dan wilayah.

Ketiga, kenyataan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut masih terus berlangsung dari tahun ke tahun dan cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, Namun persoalan ini belum menjadi agenda prioritas dalam implementasi kebijakan yang ada. Padahal Indonesia memiliki Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sebagai awal perjuangan Indonesia menyatukan wilayahnya yang berhasil diakui secara internasional dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Conventions on Law of The Sea (UNCLOS) 1982 yang diratifikasi pada tahun 1985.

Ketiga poin diatas diakui atau tidak memang menjadi pemicu berulangnya kasus mengenai perbatasan ini. Kembali kepada kasus penangkapan tiga pegawai KKP tempo hari, Indonesia memang sudah menetapkan garis batas pangkal kepulauan berdasarkan UNCLOS sehingga wilayah tempat kejadian perkara penangkapan tiga pegawai KKP tersebut memang termasuk kedalam wilayah Indonesia. Persoalannya, Malaysia belum menyepakati perihal batas wilayah laut tersebut karena memang jarak antara Indonesia dan Malaysia (termasuk Singapura) begitu berdekatan. Sehingga batas wilayah yang ditetapkan oleh Indonesia baru sebatas klaim dari Indonesia dan belum menjadi kesepakatan bersama dengan Malaysia. Tiadanya kesepakatan mengenai tapal batas inilah yang menyebabkan persoalan demi persoalan seperti ini akan terus terjadi.

Oleh karena itu, *political will* dari pemerintah Indonesia untuk menyatukan persepsi dan mencari kesepakatan dengan Malaysia dalam pembicaraan *government to government* (G to G) menjadi keniscayaan. Walaupun selalu ada kemungkinan tidak tercapainya kesepakatan dalam kata lain harus berujung kepada pengadilan internasional, maka harus diupayakan untuk diselesaikan dalam tingkatan regional seperti ASEAN ketimbang diselesaikan dalam Mahkamah Internasional seperti kasus Sipadan dan Ligitan.

Persoalan Klaim Budaya

Persoalan lain yang memicu konflik antara Indonesia-Malaysia adalah mengenai seringnya budaya Indonesia di klaim sebagai budaya yang dimiliki oleh Malaysia. Sebagai negara yang secara geografis berdekatan dan memiliki rumpun budaya yang sama, tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya akulturasi budaya antara masyarakat kedua negara. Namun, dalam konflik yang terjadi dalam hal ini, bukanlah mengenai adanya kemiripan budaya akibat adanya akulturasi tapi lebih kepada klaim atau pengakuan atau perampokan terhadap budaya Indonesia yang dilakukan Malaysia.

Berikut budaya Indonesia yang pernah di-klaim oleh Malaysia

No	Nama Budaya	Di Klaim oleh
1	Naskah Kuno dari Riau/manuscript from Riau	Pemerintah Malaysia
2	Naskah Kuno dari Sumatera Barat / manuscript from West Sumatera	Pemerintah Malaysia
3	Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan / manuscript from South Sulawesi	Pemerintah Malaysia
4	Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara / manuscript from southeast Sulawesi	Pemerintah Malaysia
5	Rendang dari Sumatera Barat / Rendang form West Sumatera	Oknum WN Malaysia
6	Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku / Rasa Syaange Song from Moluccas	Pemerintah Malaysia
7	Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur / Reog Ponorogo from east java	Pemerintah Malaysia
8	Lagu Soleram dari Riau / Soleram Song from Riau	Pemerintah Malaysia
9	Lagu Injit-injit Semut dari Jambi Injit-injit semut song from Jambi	Pemerintah Malaysia
10	Alat Musik Gamelan dari Jawa / The Gamelan musical instrument from Java	Pemerintah Malaysia
11	Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur / Kuda Lumping Dance form East Java	Pemerintah Malaysia
12	Tari Piring dari Sumatera Barat / Tari Piring form West Sumatera	Pemerintah Malaysia
13	Lagu Kakak Tua dari Maluku / Kakak Tua Song from Mollucas	Pemerintah Malaysia
14	Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara	Pemerintah Malaysia
15	Motif Batik Parang dari Yogyakarta	Pemerintah Malaysia
16	Badik Tumbuk Lada	Pemerintah Malaysia
17	Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat	Pemerintah Malaysia
18	Kain Ulos	Pemerintah Malaysia
19	Alat Musik Angklung	Pemerintah Malaysia
20	Lagu Jali-Jali	Pemerintah Malaysia
21	Tari Pendet dari Bali	Pemerintah Malaysia

Sumber : <http://budaya-indonesia.org>

Persoalan klaim budaya ini secara eksplisit juga menggambarkan betapa pemerintah Indonesia lengah dalam mengamankan kekayaan budayanya. Beragam produk budaya asli Indonesia belum semuanya dicantumkan dalam daftar representatif UNESCO sesuai Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang Warisan Budaya Tak Benda (*Intangible Cultural Heritage*). Padahal konvensi UNESCO tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dan, terhitung 15 Januari 2008, Indonesia resmi menjadi negara pihak konvensi.

Adanya faktor kelengahan Indonesia dalam menjaga warisan budaya yang dimanfaatkan oleh Malaysia dalam melakukan klaim menjadikan konflik antar kedua negara lebih memuncak dalam tataran masyarakat (*state people*). Kemarahan rakyat Indonesia terhadap klaim pemerintah dan oknum warga negara Malaysia menjadi api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa membakar lebih besar bila pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia tidak melakukan tindakan penyelamatan aset budaya bangsa.

Persoalan Tenaga Kerja Indonesia

Kekerasan demi kekerasan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia juga menjadi sumber konflik antar kedua negara. Berdasarkan data Badan Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sejak tahun 2005, tindak kekerasan terhadap TKI di Malaysia sudah mencapai angka 173 kasus. Harian *The Star Kuala Lumpur* mengungkapkan, pada tahun 2005 terdapat 39 kasus kekerasan terhadap TKI, 2006 meningkat menjadi 45 kasus, 2007 terjadi 39 kasus, 2008 naik lagi jadi 42 kasus, dan 2009 sudah terjadi 9 kasus termasuk Modesta Rengga Kaka, 27, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Kekesalan masyarakat Indonesia makin memuncak ketika pelaku tindak kekerasan (majikan) tidak mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya. Bahkan, seringkali korban kekerasan (TKI) yang mendapatkan hukuman. Pemerintah Malaysia seakan akan melindungi kekerasan yang dilakukan warga negaranya dan sebaliknya belum ada tindakan tegas dan kongkrit dari pemerintah Indonesia untuk melindungi TKI. Berdasarkan data dari Duta Besar Indonesia di Malaysia, Da'i Bachtiar, hingga tahun 2010 terdapat 354 TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia.

Kasus demi kasus kekerasan yang dialami TKI Indonesia di Malaysia akhirnya menyebarkan sentimen negatif bagi penduduk masing-

masing negara terutama Indonesia. Berbagai elemen masyarakat menganggap pengiriman TKI ke Malaysia sudah harus di evaluasi ulang mengingat seringnya terjadi penganiayaan, pelecehan seksual dan tindak kekerasan lainnya. Unjuk rasa yang menuntut pemerintah Indonesia bersikap tegas dan melindungi warganya di Malaysia sudah berulang kali dilakukan oleh elemen masyarakat namun, hingga saat ini belum ada langkah kongkrit dari pemerintah RI dalam menangani kasus yang menimpa TKI.

Diplomasi Kepala Tegak

Berdasarkan pembahasan mengenai ketiga poin yang menjadi penyulut konflik antara Indonesia-Malaysia, terlihat jelas bahwa poin utamanya adalah kelengahan Indonesia sendiri dalam mempertahankan haknya apakah itu batas teritorial, ragam budaya Indonesia hingga perlindungan terhadap warga negara yang bekerja di Malaysia.

Pemerintah Indonesia sudah seharusnya meningkatkan hubungan diplomatik yang bermartabat dengan Malaysia. Indonesia sudah seharusnya memerintahkan setiap duta besar terutama duta besar Indonesia di Malaysia untuk menegakkan kepala dan membusungkan dada sebagai perwakilan bangsa yang memiliki harkat dan martabat. Selama ini terkesan sekali diplomat Indonesia bahkan presiden SBY terlihat lunak dalam menghadapi berbagai kasus yang melibatkan Indonesia-Malaysia. Bahkan dalam kasus penangkapan tiga pegawai KKP oleh Polisi Diraja Malaysia, terlihat *'inferiority complex'* pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Malaysia. Setidaknya bisa dilihat dari reaksi pemerintah Malaysia yang lebih tegas dan berharga diri ketimbang reaksi pemerintah Indonesia.

Tidak heran, reaksi masyarakat Indonesia begitu besar dan bahkan tidak sedikit yang menginginkan perang militer dengan Malaysia. Dengan kondisi saat ini, perang memang bukanlah jalan keluar yang normal dan masuk akal karena dengan tingkatan konflik seperti ini, jalur diplomasi masih jalan keluar yang paling baik. Namun, setidaknya reaksi masyarakat Indonesia yang berlebihan tersebut mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahnya untuk bersikap tegas kepada Malaysia dan menegakkan harkat dan martabat bangsa dimata Malaysia dan dunia.

— **Benni Inayatullah** —

Akar konflik Indonesia-Malaysia sesungguhnya bersumber dari ketidaktegasan pemerintah Indonesia sendiri dalam menjaga hubungan dengan Malaysia. Kemampuan diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan persoalan dengan Malaysia masih jauh dari harapan sehingga percaya diri dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya yang seringkali bersinggungan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Dana Mengalir di DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga politik yang memiliki tanggung jawab pada masyarakat dengan mempersiapkan alternatif kebijakan publik terbaik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kedudukannya yang strategis, diberikan ruang untuk melakukan pengakomodasian aspirasi dari berbagai sumber, pihak, dan kepentingan untuk menetapkan bagaimana kebijakan politik tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat.

Selain itu, DPR memiliki beberapa fungsi yang melekat secara langsung dan diatur hukum guna merepresentasikan wakil masyarakat dan berorientasi bagi pembangunan jangka panjang di masyarakat. Atas dasar hal di atas, harapan DPR memiliki infrastruktur yang memadai dan adaptif menjadi sebuah tuntutan yang perlu secepatnya dipenuhi agar implementasi fungsi dan representasinya sebagai wakil masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal. Infrastruktur tersebut meliputi fisik dan non fisik yang berkaitan secara langsung dengan sistem pengambilan kebijakan politik di DPR.

Dalam perjalanannya, pemenuhan infrastruktur dan pelaksanaan representasi sebagai wakil rakyat banyak menuai pro dan kontra terlebih yang berkaitan dengan dana dan pembiayaan. Pro dan kontra ini berdampak pada kualitas kinerja dan citra DPR sebagai lembaga politik dan publik. Setidaknya ada empat kasus yang memberikan gambaran tentang pro dan kontra tersebut.

Pertama, rencana pembangunan gedung DPR RI baru beserta kelengkapannya senilai Rp1,8 triliun yang diumumkan tepat di hari ulang tahun ke-65 pada Senin. Pembangunan direncanakan dimulai Oktober 2010 dengan menggunakan dana dari APBN Perubahan 2010 yang bersifat jamak (*multiyears*) selama tiga tahun. Desain gedung ini telah mengantisipasi kebutuhan untuk lima puluh tahun ke depan, dimulai tahun 2010 dengan penambahan anggota DPR dari 550 menjadi 560 ditambah 1.680 staf ahli dan asisten, serta penambahan karyawan lainnya. Jika dihitung secara manual dan

general pembangunan satu ruangan anggota DPR akan seharga 2,8 miliar. Nilai itu sangat mahal untuk perkantoran di Jakarta.

Kedua, rencana dana aspirasi bagi daerah pemilihan (dapil) dan konstituen. Merujuk pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat dua komponen khusus transfer dana ke daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dua komponen ini dimaksudkan untuk melakukan pemerataan pembangunan di daerah baik yang bersifat nasional maupun lokal sehingga pertumbuhan ekonomi tetap bisa dipertahankan.

Meskipun proses tersebut telah berjalan dan transfer dana ke daerah meningkat setiap tahunnya, tidak serta merta menghentikan permintaan daerah untuk mendapat alokasi tambahan, sehingga berbagai cara dilakukan dan salah satunya melalui jalur politik. Jalur politik diambil sebagai konsekuensi logis dari kontrak politik yang dilakukan partai politik pada saat kampanye pemilu terdahulu. Disinilah peran DPR menjadi penting sebagai jembatan dan wujud representasi rakyat di parlemen. Sehingga tidak salah jika sempat muncul ide Partai Golkar untuk menyediakan dana aspirasi Rp 15 milyar per dapil dan atau Rp 1 milyar per desa/kelurahan.

Usulan tersebut berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan soal kewajiban anggota DPR, antara lain menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Usulan ini disinyalir banyak pihak sebagai salah satu upaya Partai Golkar untuk memenuhi kontrak politiknya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Ketiga, adalah kasus penerimaan dana oleh anggota DPR pada saat pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) tahun 2004 yang telah menetapkan tersangka dan dalam proses di KPK. Kasus dugaan suap ini pertama kali dibeberkan Agus Condro, mantan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) yang mengaku telah menerima Rp 500 juta dalam bentuk cek perjalanan usai Miranda Goeltom terpilih menjadi Deputy Senior Gubernur BI. Dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ada 102 orang yang menerima cek perjalanan dan diduga terkait pemilihan Deputy Senior Bank Indonesia. Dari jumlah itu, sekitar sepuluh anggota DPR mencairkan sendiri dananya. Lainnya, cek perjalanan itu dicairkan oleh kerabat anggota DPR bersangkutan.

Bermula dari hal tersebut selain telah menetapkan vonis, KPK menetapkan 26 politisi termasuk mantan menteri sebagai tersangka kasus suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank BI Miranda Goeltom tahun 2004 yang akan dijerat Pasal 5 Ayat 2 jo Pasal 5 Ayat 1 huruf a dan b atau Pasal 11 UU No 19 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keempat, biaya perjalanan dinas DPR dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU). Biaya pembahasan RUU di DPR dinilai sangat tinggi dan mahal. Khusus untuk studi banding atau kunjungan kerja ke luar negeri (Kunker LN) oleh Panitia Kerja (Panja) DPR sebelum RUU bersangkutan disusun sudah memakan biaya Rp 1,7 miliar. Secara detail seperti di bawah ini

1. Kunker LN dalam rangka penetapan RUU inisiatif DPR, Rp 17,8 miliar
2. Kunker LN Baleg, Rp 2 miliar
3. Kunker LN dalam rangka pembahasan RUU usul DPR, Rp 26,7 miliar
4. Kunker LN BAKN, Rp 940 juta
5. Kunker LN II Komisi, Rp 14,9 miliar
6. Kunker LN Komisi kasus spesifik, Rp 2,2 miliar
7. Kunker LN Badan Anggaran, Rp 2 miliar
8. Delegasi dalam kegiatan organisasi parlemen internasional, Rp 8,1 miliar
9. Delegasi dalam kegiatan parlemen regional, Rp 4 miliar
10. Kunjungan teknis LN BKSAP ke Australia, Qatar, Suriah, China, Korea Utara, Mexico, dan Afrika Selatan, Rp 6,8 miliar
11. Kunker LN BK, Rp 1,6 miliar
12. Studi komparasi pengelolaan anggaran parlemen BURT, Rp 3 miliar.
13. Kunker LN Pimpinan DPR RI, Rp 15,5 miliar

Skema anggaran belanja perjalanan ke luar negeri yang digunakan DPR harus ditinjau ulang karena nilainya cukup besar yaitu senilai Rp 170 milyar. Meskipun protes ini mendapat tanggapan yang datar dari DPR yang berpendapat bahwa dana tersebut telah disesuaikan dengan orientasi program dan tujuan yang dimaksud.

— **Aly Yusuf** —

Dalam perjalanannya, pemenuhan infrastruktur dan pelaksanaan representasi sebagai wakil rakyat banyak menuai pro dan kontra yang terlebih yang berkaitan dengan dana dan pembiayaan, dimana pro dan kontra ini berdampak pada kualitas kinerja dan citra DPR sebagai lembaga politik dan publik.

Menakar Kinerja DPR

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014 yang dilantik pada 1 Oktober 2009, kini sudah genap satu tahun bertugas mengemban aspirasi rakyat di Senayan. Meskipun periode sekarang diisi 70 persen pendatang, ternyata tidak mampu memperbaiki citra dan wajah buram DPR selama ini.

Alih-alih memperbaiki citra parlemen, DPR yang mayoritas diisi pendatang baru itu, justru semakin memperburuk wajah DPR dengan berbagai isu kontroversial belakangan ini. Mulai dari kebijakan pemberian fasilitas yang banyak dikritik publik, usulan dana aspirasi bagi setiap anggota DPR, usulan dana desa, rumah aspirasi, tingkat kehadiran rendah, dan yang terbaru kontroversi rencana pembangunan gedung baru yang disertai fasilitas ruang rekreasi, kolam renang, pusat kebugaran, dan ruang spa yang akan menguras APBN sebesar Rp 1,6 triliun.

Setelah rencana pembangunan gedung baru yang mengundang kontroversi di masyarakat. Kali ini DPR disorot karena beberapa anggota DPR dari Komisi X yang melakukan kunjungan kerja atau studi banding ke 3 negara hanya untuk membahas RUU Pramuka. Beberapa kebijakan kontroversial DPR belakangan ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat dan semakin menurunkan citra dan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR. Selain itu, potret buram DPR periode sebelumnya – terjerat korupsi, tersandung skandal seks, dan rendahnya tingkat kehadiran – ternyata juga masih mencoreng wajah DPR.

Kinerja rendah

Selain diukur dari persepsi dan tingkat kepercayaan publik, citra DPR masih sangat rendah. Kinerja DPR 2009-2014 dalam menjalankan fungsi-fungsi kedewanan juga masih penuh dengan catatan merah. Paling tidak ada tiga indikator rendahnya kinerja DPR jika diukur dari fungsi utama DPR (legislasi, penganggaran, dan pengawasan).

Pertama, produktivitas DPR dalam menjalankan fungsi legislasi relatif rendah. Selama setahun ini, DPR baru menyelesaikan pembahasan tujuh rancangan undang-undang (RUU). Itu pun hanya satu RUU, yakni RUU revisi UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang dituntaskan. Itu artinya hanya 10 persen dari target 70 RUU dalam Prolegnas yang harus diselesaikan.

Kedua, dalam menjalankan fungsi penganggaran DPR masih kurang aspiratif. DPR seolah hanya memperjuangkan kepentingan diri sendiri, dan kurang berempati terhadap kondisi masyarakat yang sedang mengalami tekanan ekonomi. Indikasinya terlihat dari penokalan keras publik atas rencana rencana pembangunan gedung baru DPR yang akan menelan biaya Rp 1,6 triliun, dana aspirasi Rp 15 miliar tiap anggota (Rp 8,4 triliun), serta biaya rumah aspirasi Rp 200 juta bagi tiap anggota DPR (112 miliar dan 3,3 triliun untuk infrastruktur). Ironisnya semua anggaran itu ditanggung rakyat melalui APBN.

Ketiga, fungsi pengawasan juga kurang optimal dan seolah hanya dijadikan alat bagi partai-partai di DPR untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Ketidakjelasan dan ketidaktuntasan kasus Bank Century menjadi potret paling terang tentang ketidakseriusan itu. Padahal gegap gempita skandal ini telah menguras energi bangsa dan mengganggu jalannya pemerintahan. Kegaduhan politik ini ternyata berakhir tanpa kejelasan.

Tanggung Jawab Partai

Kondisi DPR hari-hari ini, tentu memunculkan pertanyaan lanjutan, siapa yang paling bertanggung jawab atas rendahnya kinerja dan wajah buram DPR belakangan ini? Rendahnya kualitas kinerja anggota DPR jelas mengindikasikan bahwa ada yang keliru dengan sistem rekrutmen calon anggota legislatif (caleg). Rendahnya kualitas dan produktivitas DPR sejatinya merupakan tanggung jawab partai, sebab semua anggota DPR diseleksi melalui mekanisme partai. Karena itu, ada satu kata yang dapat diajukan untuk menjawab pertanyaan itu: partai.

Ada empat problem internal partai yang menyebabkan rendahnya integritas dan kualitas kinerja DPR. **Pertama**, rapuhnya sistem rekrutmen caleg dan ketidakjelasan sumber pemasukan keuangan partai. Sistem penjangkangan caleg di beberapa partai terperangkap pada praktik politik uang akibat kebutuhan finansial partai. Sementara kompetensi, rekam jejak, dan integritas menjadi pertimbangan

terakhir dalam kriteria penjurangan. Apalagi setelah terpilih, para anggota DPR juga diwajibkan memenuhi setoran ke partai.

Kedua, implikasi dari macetnya fungsi pendidikan politik. Alih-alih memberi pendidikan politik, para elite partai justru menularkan pragmatisme politik kepada pemilih dengan membangun relasi bersifat transaksional, sehingga relasi wakil rakyat-konstituen dibangun dengan uang. **Ketiga**, efek dari disfungsi aspirasi dan artikulasi partai. Disfungsi artikulasi dan agregasi kepentingan oleh partai mendorong penyimpangan di DPR. Selain tugas partai, fungsi aspirasi memang menjadi tugas DPR, tetapi tidaklah pantas jika sumber dananya dari uang rakyat (APBN).

Keempat, dampak dari kekeliruan sistem komunikasi politik, terutama metode mengumbar janji dalam kampanye, menyebabkan problem bawaan bagi para anggota DPR. Akibatnya partai dan caleg terjebak janji kampanye sendiri. Padahal fungsi DPR bukan eksekutor kebijakan. Tuntutan konstituen atas janji-janji kampanye inilah mendorong perilaku menyimpang anggota DPR.

Rendahnya kualitas dan produktivitas DPR sejatinya merupakan tanggung jawab partai politik, sebab semua anggota DPR diseleksi melalui mekanisme partai.

Rekomendasi: Mereformasi DPR

DPR yang kian terpuruk ini sudah saatnya menyadarkan kita semua, terutama para anggota DPR, untuk melakukan reformasi total. Salah satunya dengan menata ulang undang-undang yang mengatur tentang kelembagaan DPR – UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) – ketimbang menata ulang gedung baru DPR. DPR perlu mereformasi internalnya melalui undang-undang maupun tata tertib di internal DPR.

Selain itu, partai politik sebagai lembaga utama yang menyeleksi dan mengontrol kualitas kinerja DPR juga perlu mereformasi diri. Karena untuk membereskan persoalan di DPR memang harus dimulai dengan

mereformasi sistem kelembagaan internal dan perilaku partai. Hal itu juga dapat ditempuh melalui revisi UU Partai Politik dan UU Pemilu. Selain revisi UU, lebih penting dari semua itu, dibutuhkan kesadaran para elite partai dan para anggota DPR untuk segera mereformasi diri.

— **Hanta Yuda AR** —

Toleransi Beribadah di Ujung Tanduk

Kasus intoleransi beribadah kembali mengemuka. Kali ini insidennya semakin brutal dengan terjadinya korban penganiayaan. Pada Minggu pagi, 12 September 2010 terjadi insiden penusukan dan pemukulan terhadap dua pemuka Gereja HKBP Pondok Timur Indah, di tempat kejadian di Ciketing, Bekasi, Jawa Barat.

Pemuka jemaat Asia Lumban Toruan Sihombing dan Pendeta Luspida Simanjuntak menjadi korban penganiayaan ketika berjalan menuju tempat akan dilangsungkannya ibadah. Asia Sihombing ditusuk di bagian kanan perut, sementara Pendeta Luspida dipukul dengan benda tumpul sehingga luka di kening dan pinggang. Pelakunya adalah sekelompok pengendara sepeda motor. Polisi kemudian mengamankan sepuluh tersangka, berusia antara 17-25 tahun, salah satu di antaranya menjabat sebagai pengurus wilayah Front Pembela Islam (FPI) Bekasi, yang dikenal masyarakat sebagai salah satu organisasi kelompok ekstrem di masyarakat.

Mencederai toleransi beribadah

Serta merta insiden ini menyita perhatian lebih besar lagi dari masyarakat. Pejabat publik, mulai dari pejabat pemerintah daerah dan aparat keamanan di Bekasi sampai kepala negara diminta tanggapan dan sikap tegasnya dalam menyikapi hal ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang belakangan ini diragukan sikap tegasnya dalam memimpin bangsa, menjadi sorotan dalam tanggung jawab pemerintah dalam hal toleransi beragama dan beribadah.

Kepala Polda Metro Jaya pada 12 September 2010 mengatakan bahwa kasus ini murni kriminalitas. Namun sulit mengatakan bahwa insiden ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya yaitu pelarangan dan penyegelan rumah ibadah jemaat HKBP di Ciketing ini sebelumnya. Sementara praktisi hukum, Todung Mulya Lubis berpendapat bahwa insiden ini bukan tindak kriminal biasa, namun merupakan teror terhadap hak beribadah.

Insiden ini mencederai toleransi beribadah, namun duduk perkara dan pohon permasalahannya perlu jelas juga, mengapa terjadi keresahan masyarakat sehingga memuncak pada insiden penganiayaan ini.

Akar masalah

Dari informasi-informasi yang dihimpun, insiden HKBP Ciketing ini tidak dapat dilepaskan dari riwayat awal jemaat ini di lokasi itu sejak tahun 1990an. Presiden SBY, seperti dikutip *Kompas.com* dalam pernyataan kepada wartawan berdasarkan info dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) meringkas duduk permasalahan yaitu akar masalahnya adalah bermula rumah tempat tinggal dijadikan rumah ibadah oleh jemaat, masyarakat sekitar keberatan namun sudah memberi toleransi selama 19 tahun. Setelah jumlah jemaat semakin besar, dan kegiatan ibadah menjadi lebih intens, warga minta agar dicari tempat lain untuk beribadah itu. Namun solusi tidak didapatkan, sehingga terjadi ketegangan, yang memuncak pada insiden penusukan pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 itu.

Kasus jemaat HKBP Ciketing kemudian semakin memanas ketika Desember 2009-Januari 2010, akumulasi keresahan masyarakat ditandai dengan aksi-aksi pelarangan warga setempat terhadap jalannya ibadah jemaat. Warga antara lain keberatan dengan gangguan lingkungan yang ditimbulkan oleh jemaat antara lain suara-suara yang dirasa gaduh, lalu lalang dan parkir kendaraan jemaat yang menghalangi jalan warga, dan terutama anggapan penyalahgunaan rumah tempat tinggal untuk ibadah gereja. Pihak HKBP Ciketing kemudian melakukan negosiasi kepada pemerintah setempat sambil mencari tempat ibadah yang tepat, namun tuntutan massa tidak terbendung lagi, sehingga rumah yang digunakan untuk ibadah disegel Pemerintah Kota Bekasi pada Januari 2010. Setelah itu, jemaat kembali beribadah dari rumah ke rumah lainnya.

Kemudian 11 Juli 2010 jemaat mulai beribadah di tanah kosong yang dibelinya di Ciketing. Namun resistensi dari warga semakin kuat, dan memanas dengan dukungan dari ormas garis keras. Sebagai aksi menuntut kepedulian dan pembelaan dari negara atas hak beribadah, jemaat HKBP sempat menggelar aksi melakukan ibadah hari Minggu 15 Agustus 2010 di depan Istana Merdeka di Jakarta. Namun aksi itu tidak mendapatkan tindak lanjut berarti dari pemerintah. Sementara itu, jemaat tetap melakukan ibadah di tanah kosong di Ciketing, sampai kemudian terjadi insiden penusukan dan pemukulan pada 12 September.

Penyebab intoleransi

Kasus HKBP Ciketing bisa jadi hanya satu dari kasus intoleransi yang mencuat karena intensnya konflik terbuka dalam penolakan terhadap tempat ibadah agama minoritas di tengah pemukiman warga yang mayoritas beragama lain. Setara Institute mencatat bahwa dalam tujuh bulan, sejak Januari-Juli 2010, di Indonesia terjadi sekitar 30 kasus kekerasan terhadap tempat ibadah umat Kristen, sebagai penolakan dari warga setempat yang beragama mayoritas Muslim. Kasus-kasus itu meliputi penyegelan dan penolakan pendirian gereja, ancaman hingga penutupan gereja, serta penghentian paksa kegiatan ibadah. Jumlah kasus tahun 2010 meningkat dari tahun 2008-2009 yang hanya 20 kasus. Pelaku aksi-aksi pelarangan itu terbanyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui surat perintah penyegelan, lalu kelompok massa, warga dan ormas Islam antara lain Front Pembela Islam (FPI).

Penyebab aksi-aksi pelarangan itu pada umumnya dilandasi pada keluhan keresahan warga setempat terhadap jemaat yang melakukan kegiatan ibadah di tempat yang dianggap bukan tempat yang resmi (berizin) untuk tempat ibadah. Keresahan juga disebabkan oleh intensitas gangguan lingkungan yang ditimbulkan sebagai dampak dari berdatangnya jemaat-jemaat yang bukan warga setempat untuk beribadah di tempat itu.

Setara Institute, menggarisbawahi gejala pembiaran oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap kasus-kasus intoleransi dan hambatan terhadap kebebasan beribadah yang sering dialami oleh jemaat dari agama minoritas.

Setara Institute mencatat tiga alasan utama, yaitu (1) Kepentingan politik yaitu Pemerintah Kota/Daerah menganggap Ormas adalah aset yang penting bagi dukungan politik. (2) Kepentingan ekonomi, seringkali di balik penghentian ibadah atau penyegelan atau pemindahan tempat ibadah ada upaya pemerasan. (3) Kepentingan ideologi, ada kelompok intoleran yang tidak ingin melihat kelompok yang berbeda aliran atau keyakinan untuk tinggal dan beribadah di wilayah itu. Menyimak laporan Setara Institute, intoleransi tidak hanya dialami umat Kristen. Dilaporkan pula gangguan pembangunan Mesjid di Bali, kuil Budha di Riau, dan renovasi Pura Hindu di NTB. Maka, bila akar masalah dan langkah kebijakan tidak ditindaklanjuti, maka intoleransi yang sudah di ujung tanduk dapat semakin meluas di Indonesia.

Setidaknya di balik kasus-kasus intoleransi, ada kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi. Revisi kebijakan peraturan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan harus benar-benar berangkat dari analisis pohon masalah. pembiaran kasus intoleransi yang sudah melanggar hukum pidana akan memicu praktek diktator kelompok mayoritas dan kelompok ekstrem dalam praktek menjalankan ibadah di masyarakat.

— **Antonius Wiwan Koban** —

Wacana Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia

Sebulan terakhir ini wacana tentang pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia (RI) ke daerah lain di luar Jakarta marak diperbincangkan publik. Bahkan orang nomor satu di negeri ini juga ikut bersuara. Dalam acara buka puasa bersama pengurus dan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jumat 3 September 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan tiga opsi yang perlu untuk dikaji lebih jauh terkait wacana ini.

Opsi *pertama*, adalah pemindahan ibukota (*capital center*) beserta pusat pemerintahan (*government center*) di Jakarta, ke tempat yang sama sekali baru. Dalam hal ini SBY mencontohkan praktek yang juga dilakukan oleh Turki, Australia, serta negara-negara lain yang telah melakukan hal serupa. Tentu tujuannya adalah untuk melepas semua masalah yang ada, dan membangun dari awal strategi geografis ekonomi, sosial, maupun politik ibukota maupun pusat pemerintahan negeri ini.

Opsi *kedua*, adalah tetap menjadikan Jakarta sebagai ibukota, dan hanya memindahkan pusat pemerintahan ke daerah baru. SBY mencontohkan praktek yang dilakukan Malaysia dalam hal ini. Yakni dengan menjadikan Kuala Lumpur sebagai ibukota, dan Putrajaya sebagai pusat pemerintahan. Sedangkan untuk opsi *ketiga*, SBY menawarkan untuk tidak memindahkan ibukota maupun pusat pemerintahan dari Jakarta. Namun dengan syarat ada pembenahan infrastruktur, terutama untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

Wacana pemindahan ibukota seakan terus bergulir dari masa ke masa mulai dari era orde lama, orde baru dan era terkini. Saat meresmikan pembangunan Kota Palangka Raya pada tahun 1957, Presiden Soekarno mengungkapkan rencana Ibukota RI dipindahkan ke kota itu. Palangka Raya adalah kota baru yang dibangun dengan membuka hutan di pinggir sungai Kahayan, Kalimantan Tengah. Alasan Bung Karno memindahkan ibu kota RI ke Palangka Raya sederhana karena kota itu berada di tengah-tengah Indonesia, sehingga tidak jauh dari pulau-pulau yang masuk dalam wilayah RI. Sebagai calon alternatif ibukota RI, Palangka Raya aman secara geologi. Ancaman gempa bumi minim. Kota itu tidak seperti Jakarta yang berada di

dekat patahan gempa. Kota itu juga terluas di Indonesia dengan luas 2.678 kilometer persegi. Bandingkan luas daratan Provinsi DKI Jakarta hanya 661,52 km persegi, atau seperempat Palangka Raya.

Wacana pemindahan Ibukota mencuat kembali pada era pemerintahan Soeharto dengan menyebut Jonggol (salah satu kecamatan di kabupaten Bogor) sebagai calon ibukota Negara. Pada Era Habibie juga mencuat wacana untuk memindahkan ibukota Negara ke Sidrap, Sulawesi Selatan, dengan alasan kota tersebut merupakan titik tengah Indonesia.

Rasionalitas pemindahan Ibukota Negara RI

Rasionalitas pertama harus disadari bahwa pemindahan ibukota dari satu kota ke kota lain adalah hal yang biasa dan pernah dilakukan. Amerika Serikat pernah memindahkan ibukota mereka dari New York ke Washington DC, Jepang dari Kyoto ke Tokyo, Australia dari Sidney ke Canberra, Jerman dari Bonn ke Berlin, sementara Brazil memindahkan ibukotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Indonesia sendiri pernah memindahkan ibukotanya dari Jakarta ke Yogyakarta.

Over Population (Jumlah penduduk melebihi daya tampung) merupakan penyebab utama kenapa banyak negara memindahkan ibukotanya. Sebagai contoh saat ini Jepang dan Korea Selatan tengah merencanakan pemindahan ibukota negara mereka. Jepang ingin memindahkan ibukotanya karena wilayah megapolitan Tokyo jumlah penduduknya sudah terlampau besar yaitu 33 juta jiwa. Korea Selatan juga sama karena wilayah kota Seoul dan sekitarnya jumlah penduduknya sudah mencapai 22 juta. Bekas ibukota AS, New York dan sekitarnya total penduduknya mencapai 22 juta jiwa.

Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduk Jakarta telah mencapai 9,5 juta jiwa. Idealnya dengan segala daya dukung dan keterbatasannya saat ini, Jakarta hanya bisa dihuni maksimal oleh 4,5 juta jiwa. Bahkan jumlah penduduk daerah Metropolitan Jakarta yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) telah mencapai jumlah 23 juta jiwa. Angka ini setara dengan total jumlah penduduk Australia atau Malaysia.

Daya dukung Jakarta juga semakin tidak kuat menanggung deras arus urbanisasi. Fenomena urbanisasi ini sangat dipengaruhi faktor ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah dan kondisi kemiskinan struktural yang telah memaksa rakyat miskin di pedesaan melakukan migrasi ke perkotaan khususnya Jakarta.

Berdasarkan hasil kajian Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pembangunan Wilayah (P4W) Institut Pertanian Bogor (2007) tentang Keterkaitan Ekonomi Sektoral dan Spatial antara Jakarta dan wilayah sekitar, ternyata pertumbuhan ekonomi di Jakarta secara signifikan tidak memberikan dampak pertumbuhan di wilayah sekitar (termasuk Indonesia seluruhnya). Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi ini secara tidak langsung mendorong penduduk untuk melakukan migrasi ke Jakarta.

Jika membandingkan luas Jakarta yang hanya 0,03 persen dan jumlah penduduknya sekitar 4,14 persen dari total Indonesia, kota ini menjadi tempat berkumpulnya pusat kegiatan sektor finansial (perbankan dan lembaga keuangan lainnya) sebesar 75,09 persen dari total nasional. Menjadi kewajaran jika banyak orang punya harapan untuk melakukan perubahan nasib di Jakarta.

Perencanaan sistematis

Merujuk pada kondisi Jakarta tersebut, wacana pemindahan ibukota Negara RI menjadi masuk akal untuk direalisasikan. Namun perlu persiapan yang optimal dan perencanaan sistematis untuk mewujudkannya. Poin krusial harus ada kesepakatan antara pemerintah dengan parlemen melalui undang-undang. Harus dijalankan terlebih dahulu kajian akademis, sehingga ada naskah akademik yang komprehensif. Setelah itu baru diajukan rancangan undang-undang (RUU) pemindahan ibukota. Dalam RUU tersebut juga disebutkan soal batas waktu dan tahapan-tahapannya secara jelas sehingga soal anggaran bisa diatasi.

Betapapun berat tekanan yang dihadapi Jakarta saat ini, tetapi hendaknya bangsa ini harus tetap sistematis dan benar dalam menentukan kebijakan. Harus menjauhkan diri dari pengambilan kebijakan yang emosional, dan berdasar transaksi politik "murahan" untuk memindahkan ibukota RI. Dipahami bahwa pemindahan ibukota merupakan pemindahan sebuah peradaban kemanusiaan yang besar. Bukan hanya status, namun segala aspek yang multidimensional terkait struktur negara, personil, infrastruktur, suprastruktur, sistem informasi dan teknologi, dan lain-lain. Aspek paling krusial adalah kebutuhan anggaran yang sangat besar dan akan menyedot anggaran belanja negara beberapa tahun.

Betapapun berat tekanan yang dihadapi Jakarta saat ini, tetapi hendaknya bangsa ini harus tetap sistematis dan benar dalam menentukan kebijakan. Harus menjauhkan diri dari pengambilan kebijakan yang emosional, dan berdasar transaksi politik "murahan" untuk memindahkan ibukota RI. Dipahami bahwa pemindahan ibukota merupakan pemindahan sebuah peradaban kemanusiaan yang besar. Bukan hanya status, namun segala aspek yang multidimensional terkait struktur negara, personil, infrastruktur, suprastruktur, sistem informasi dan teknologi, dan anggaran yang dibutuhkan.

— **Endang Srihadi** —



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program adalah Adinda Tenriangke Muchtar.

TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. **TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, *policy brief* dan analisis mingguan (*Weekly Analysis*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*) dan kajian tahunan (*Indonesia Report*).

Alamat kontak:
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI

Analisis bisnis

Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat meningkatkan nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam perencanaan stratejik korporat untuk membuat keputusan yang dapat diandalkan. Divisi Riset Kebijakan Bisnis TII hadir untuk membantu para pemimpin perusahaan dengan memberikan berbagai rekomendasi praktis dalam proses pengambilan keputusan.

Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain: **(1) Analisis Keuangan Perusahaan**, yang meliputi analisis keuangan dan kajian risiko keuangan. **(2) Konsultasi Perencanaan Korporat** meliputi riset ekonomi dan industri, evaluasi kinerja, valuasi bisnis dan valuasi merk. **(3) Analisis Pemasaran Strategis** yang meliputi pemasaran strategis dan disain program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Riset bidang ekonomi

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi**, **(2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional**, **(3) Evaluasi Program**.

RISET BIDANG SOSIAL

Analisis sosial

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi

guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI & PELATIHAN BIDANG POLITIK

Survei Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pilkada, yaitu (1) Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

Pelatihan DPRD

Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

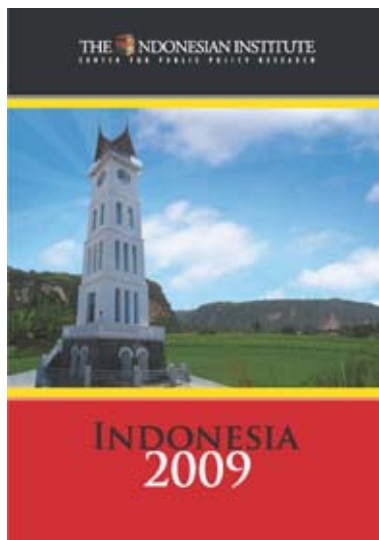
Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

Teloh Terbit INDONESIA REPORT 2009

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) telah menerbitkan kembali publikasi kajian tahunan, **Indonesia 2009** setelah sebelumnya menerbitkan laporan tahunan Indonesia 2005, 2006, 2007, dan 2008. Buku Indonesia 2009 merupakan salah satu edisi Indonesia Report yang dipublikasikan TII secara tahunan.

Tujuan penerbitan ini adalah untuk memberikan potret situasi ekonomi, hukum, sosial dan politik; serta kebijakan Pemerintah Indonesia. Indonesia 2009 diterbitkan dengan tujuan agar bisa memberikan data yang lengkap tentang Indonesia di tahun 2009. Publikasi tahunan ini diharapkan bisa menjadi landasan dalam memprediksi kecenderungan jangka pendek dan jangka menengah Indonesia.

Penerbitan laporan tentang Indonesia secara tahunan ini juga diharapkan akan dapat membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis serta kalangan akademisi dan *think tank* nasional dan internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, keamanan, dan sosial di Indonesia.



Topik-topik yang diangkat dalam Indonesia 2009:

1. Tahun Pemulihan Ekonomi
2. Perkembangan Pembangunan Infrastruktur
3. Cicak Vs Buaya: Perseteruan Tiga Instansi Penegak Hukum
4. Daur Ulang Otonomi Daerah
5. Politik Indonesia 2009: Partai Politik, Pemilu, Koalisi Pemerintahan dan Prospek Demokrasi
6. Potret dan Kinerja Representasi DPR Baru (2009-2014)
7. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri
8. Potret Buram Perlindungan Anak

Tim Penulis:

Adinda Tenriangke Muchtar
 Aly Yusuf
 Antonius Wiwan Koban
 Benni Inayatullah
 Endang Srihadi
 Hanta Yuda AR
 Nawa Poerwana Thalo

Supervisi: Anies Baswedan (Direktur Eksekutif & Riset)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Sdri. Meilya Rahmi / Sdr. Hadi Joko di 021 **3905558**

atau email contact@theindonesianinstitute.com atau theindonesianinstitute@yahoo.com.

Direktur Eksekutif & Riset

Anies Baswedan

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro

Peneliti Bidang Politik

Aly Yusuf, Benni Inayatullah,

Hanta Yuda AR

Peneliti Bidang Sosial

Antonius Wiwan Koban,

Endang Srihadi

Staf Program dan Pendukung

Edy Kuscahyanto, Hadi Joko S.,

Suci Mayang

Administrasi

Diana Paramita, Meilya Rahmi.

Sekretaris: Lily Fachry

Keuangan: Rahmanita

Staf IT: Usman Effendy

Desain dan Layout

Harhar, Benang Komunikasi

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

www.theindonesianinstitute.com

e-mail: theindonesianinstitute@yahoo.com

